

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa kedudukan Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia. Selain Advokat juga ada profesi lain yang merupakan penegak hukum, antara lain Hakim, Jaksa, dan Polisi. Ada yang menyatakan bahwa masyarakat pun sebagai penegak hukum dalam pengertian yang luas. Profesi penegak hukum ini yang diharapkan dapat menjadi pilar-pilar penting dalam menopang keadilan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Sebagai penyandang status profesi yang terhormat dan mulia (*Officium Nobile*) mempunyai tanggung jawab yang besar menegakan keadilan dalam dunia hukum. Advokat haruslah dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau klien yang mengalami masalah hukum tanpa membedakan latar belakang mereka. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menuturkan bahwa; “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya”.

Advokat dalam mendampingi klien harus bersungguh-sungguh atau secara maksimal dalam membela kepentingan kliennya. Pembelaan yang dilakukan oleh Advokat secara maksimal dimaksudkan agar kepentingan dari kliennya dapat terlindungi dari segala bentuk ancaman. Berusaha keras

dengan mengandalkan keahliannya dalam bidang hukum dan dengan didasarkan pada komitmennya sebagai penegak hukum. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan kepentingan pribadi Advokat dan kepentingan pihak lainnya, pasti yang diutamakan adalah kepentingan kliennya sebagai bentuk totalitas kinerja profesi Advokat.

Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis sebagai berikut;

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Advokat selalu menuruti ketentuan Undang-Undang atau kepantasan kepada kliennya, antara lain membela kliennya semaksimal mungkin sesuai dengan kewajiban *fiduciary* yang disandangnya.
2. Akan tetapi, dilain pihak, karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin tanpa kompromi, maka Advokat haruslah hati-hati jika dia dihadapkan untuk membela kliennya, mungkin dengan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam *Canon 7* dari *Code of Professional Responsibility* dari Advokat di Amerika Serikat bahwa Advokat haruslah mewakili kliennya secara habis-habisan (*zealous*) dalam batas-batas hukum yang berlaku. “A lawyer should represent a client zealously within the bounds of the law”.¹

¹Munir Fuady, 2005, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33-34.

Advokat dalam bertindak harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Tidak melakukan tindakan yang tercela, dan menghormati kode etik Advokat beserta nilai-nilai luhur profesi hukum.

Lingkup kerja Advokat berkaitan dengan bidang litigasi dan non litigasi. Pekerjaan dibidang litigasi berhubungan dengan pendampingan klien di Pengadilan, mulai dari tahap penyidikan ditingkat Kepolisian, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan oleh hakim ditingkat pengadilan. Sedangkan pada bidang non-litigasi yaitu aktivitas profesi Advokat di luar pengadilan. Bidang-bidang tersebut meliputi;

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
2. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasehat hukum (*legal adviser*);
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*);
4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*);
5. Memberikan informasi hukum;
6. Membela dan melindungi hak asasi manusia;
7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu atau lemah.²

Jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Advokat maka dia berhak untuk mendapatkan sejumlah imbalan atau honorarium. Besaran honorarium yang diterima Advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kliennya.

² V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 21.

Kesepakatan yang dibuat tidak memiliki batasan oleh undang-undang atau kode etik Advokat sehingga bayaran kepada seorang Advokat dapat berjumlah sangat besar. Biasanya unsur kerumitan dalam sebuah perkara yang menjadi tolak ukur penentuan besar honorarium jasa Advokat. Perlu diingat mengenai hal yang diatur dalam Kode Etik Advokat dalam BAB III Pasal 4 Butir d bahwa; “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.”

Menegaskan kepada Advokat untuk tidak membebani klien dengan honorarium yang tidak dapat disanggupi. Kesepakatan besaran honorarium atas jasa Advokat harus ditentukan secara wajar. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Disisi lain tentang perkembangan kejahatan yang semakin rumit, akibat kemajuan teknologi dan lahirnya modus-modus operandi baru yang mengharuskan aparat penegak hukum berusaha lebih giat dalam memberantas kejahatan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat disatu sisi sangat membantu kehidupan manusia, namun disisi lain dimanfaatkan oleh orang atau kelompok orang sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan menghasilkan harta kekayaan yang sifatnya ilegal. Hasil dari kejahatan (*Criminal Proceeds*) ingin disamarkan asal-usulnya agar perolehannya dapat terlihat berasal dari suatu kegiatan yang sah. Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari

kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*), memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.³

Kegiatan menyamarkan asal-usul dana haram (*Illegal Money*) diistilahkan sebagai Pencucian Uang (*Money Laundering*). Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang bersifat lanjutan. Artinya kejahatan ini sebagai tindak pidana yang dilakukan untuk menjadi penyempurna dalam tindak pidana utama (*Predicate Crime*). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budk/wanita/anal/senjata gelap, penculikan, terorisme, penggelapan, dan sebagainya.

Rumusan definisi tindak pidana pencucian uang secara universal dan komprehensif masih belum ada. Negara-negara lainnya lebih memilih membuat definisi sendiri berdasarkan perspektifnya. Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*,

³ Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, hlm. 2.

maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana.⁴ Hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk definisinya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), dengan penjelasan tambahan atas unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerimanya dan menguasainya.⁵

Penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai modus pencucian uang bisa saja dilakukan dengan bantuan Advokat. Honorarium Advokat menjadi media dalam melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan tidak adanya

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, www.negarahukum.com/hukum/1562.html, 23 Februari 2016.

aturan tentang batas honorarium, membuka pintu untuk mengadakan transaksi dalam jumlah besar bahkan tidak wajar antara klien kepada Advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; “Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan /atau masyarakat.”

Pasal –pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut oleh pihak berwajib apabila menerima honorarium dari kliennya yang harta kekayaannya diduga berasal dari suatu tindak pidana. Honorarium tersebut merupakan upah atas Jasa Hukum yang telah diberikan oleh Advokat sehingga menurut hukum positif adalah sesuatu yang legal. Disisi lain, pendapat yang berseberangan disampaikan oleh pengamat hukum pidana, Gandjar L Bondan. Menurut Gandjar, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UUTPPU”) melarang setiap orang menerima atau menguasai penempatan, berdasarkan hubungan transaksi apapun harta

kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana.⁶ Benturan antara norma hukum menjadikan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Perlu pengkajian lebih komperhensif mengenai kriteria honorarium advokat dari seorang pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis berupaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah, yaitu;
Bagaimana Honorarium Advokat yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana pengaturan mengenai honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan agar memberi manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

⁶ Ilman Hadi, *Honorarium Advokat dari Pelaku Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang>, diakses 11 Maret 2016.

Hasil penelitian memberikan manfaat bagi jalannya proses perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus mengenai tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, Advokat dan mahasiswa, pada khususnya untuk mengetahui tindak pidana pencucian oleh Advokat melalui pemberian honorarium dan akibat hukumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya dari penulis sendiri tanpa melakukan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian penulis lain. Apabila usulan penulisan hukum/skripsi terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis lampirkan beberapa hasil penulisan hukum/skripsi dari penulis yang lain;

1. Judul :

Peran dan Fungsi Kode Etik Dalam Mencegah Advokat Melakukan Mafia Peradilan.

2. Identitas :

Sylvia Yismaya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (03 05 08508).

3. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran dan fungsi kode etik dalam mencegah Advokat melakukan mafia peradilan ?

4. Tujuan Penelitian :

Untuk memperoleh data tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah Advokat melakukan mafia peradilan.

5. Kesimpulan :

Dalam hal menunjang berfungsinya sistem hukum perlu adanya upaya penegakkan sistem etika yang berupa kode etik. Kode etik Advokat dapat berfungsi sebagai mana mestinya, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi Advokat itu sendiri.

Peran kode etik dalam mencegah Advokat melakukan mafia peradilan dapat kita lihat pada Pasal 9 Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan, dan atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi seperti disebut pada Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia.

Kita harus mengakhiri praktek-praktek curang dan penuh manipulative dari sistem peradilan di negeri ini. Hal ini penting dilakukan, kalau Indonesia ingin menjadi sebuah Negara dan Bangsa yang bermartabat.

1. Judul :

Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi.

2. Identitas :

Fransiscus Xaverius Raditya Wicaksono, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (09 05 10070).

3. Rumusan Masalah :

Bagaimana penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi perkara pidana korupsi ?

4. Tujuan Penelitian :

Memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi ?

5. Kesimpulan :

Sebagai jawaban permasalahan penelitian hukum ini, penegakan kode etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar

tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan Peraturan PERADI tersebut maka peranan Peradi memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik.

1. Judul :

Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian POLTABES Yogyakarta

2. Identitas :

Eva Elisabeth Rumapea, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (06 05 0940).

3. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peran Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada istri pada tingkat penyidikan di Kepolisian POLTABES Yogyakarta ?
 - b. Kendala apa yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut ?
4. Tujuan Penelitian :
- a. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimanakah Peran Advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) selama proses penyidikan di Kepolisian POLTABES.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut.
5. Kesimpulan :
- a. Peranan dari Advokat dalam memberikan perlindungan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian sampai di tingkat pengadilan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan pendampingan kepada pihak korban kekerasan dalam rumah khususnya kekerasan fisik, serta mengupayakan pelayanan korban selama proses berlangsung dan memberikan rasa aman kepada korban, bahwa dengan korban didampingi oleh Advokat, korban jauh lebih baik dibandingkan tidak adanya pendampingan dari Advokat secara langsung. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan

oleh suami dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

- b. Kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain, adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap peran Advokat itu sendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan selama proses penyidikan di tingkat Kepolisian sampai di tingkat pengadilan, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan selama proses berlangsung. Kendala lain diakibatkan karena korban itu sendiri tiba-tiba tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, tidak adanya saksi-saksi karena saksi-saksi menganggap hal tersebut tidak layak untuk diungkapkan, tersangkanya sendiri telah melarikan diri serta visumnya telah hilang dalam pemberian bantuan hukum, Advokat sering menemukan bahwa klien tidak jujur memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya karena adanya ketakutan dari korban itu sendiri, dan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan Advokat.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan

tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan.

2. Pencucian Uang adalah suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah..
3. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memeberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaiu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 3) Kode Etik Advokat dalam BAB III Pasal 4 butir d, perihal honorarium advokat.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Narasumber, M. Irsyad Thamrin, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Yogyakarta
- 2) Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh advokat melalui pemberian honorarium.
- 3) Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum.

3. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah

diketahui (diyakini/*aksimomatik*) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang khusus hasil penelitian Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan berisi Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Bagaimana Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.